



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung 22411 Sumatera Utara
Post-el : inspektur@taputkab.go.id, Laman : <http://www.taputkab.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan kemudahan yang telah diberikan bagi kita semua, sehingga dengan Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dan dijabarkan dalam satu periode, yaitu tahun 2025 secara sistematis.

Dalam melaksanakan kegiatan selama periode 2025, Inspektorat merencanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan. Dimana dalam program-program tersebut menggambarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ke depan pada umumnya sehingga dapat mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.



Inspektur Daerah,

Drs. Erikson Siagian, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690422 198903 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	28
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
4.1. Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Perangkat Daerah ...	41
BAB V PENUTUP	46



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.a	Hasil Evaluasi Renja Inspektorat daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023	13
Tabel 2.1.b	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2024	18
Tabel 2.1.c	Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat	23
Tabel 2.1.d	Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan	23
Tabel 2.3.a	Kekuatan dan Kelemahan Yang dihadapi Selama Tahun 2023	28
Tabel 2.3.b	Peluang dan Tantangan Yang dihadapi Selama Tahun 2023	28
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	30
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	35
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026	40
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan Inspektorat Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2	Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
------------	---	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah menyusun Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

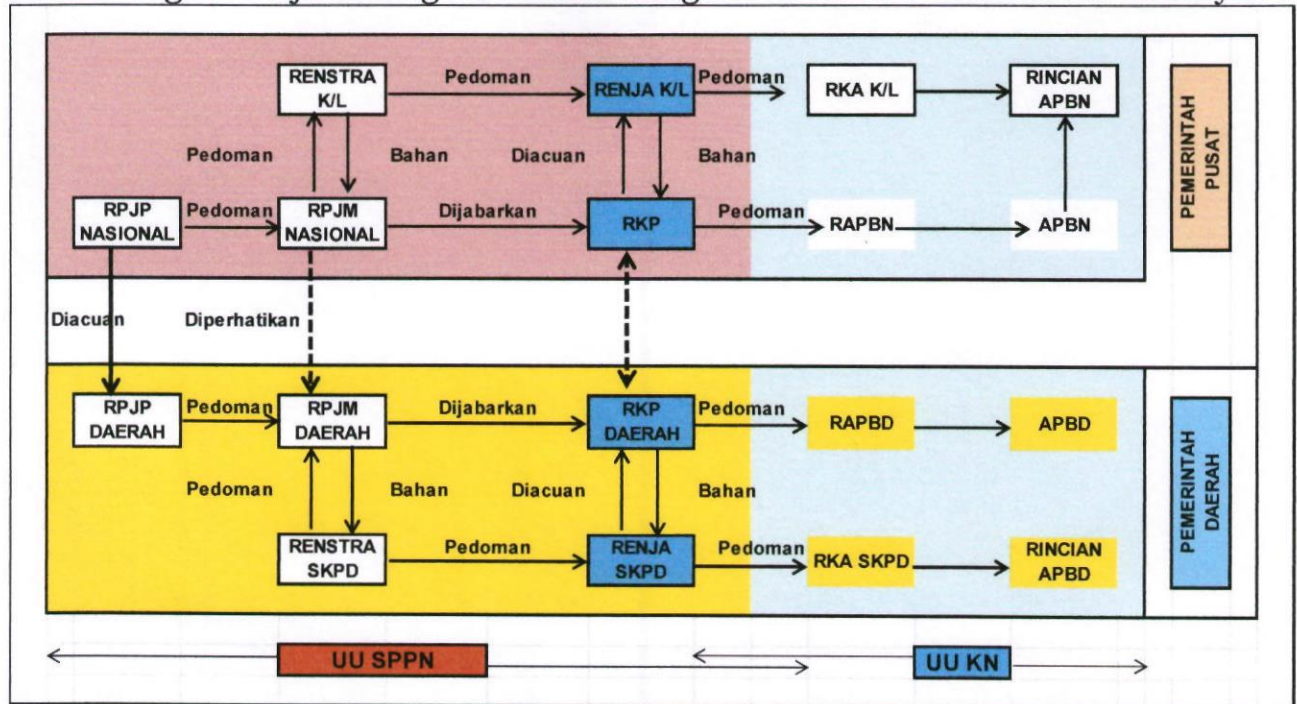
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara

lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. **Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek :

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat;
- 2) Kondisi pelayanan Inspektorat;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat;
- 4) Data Pokok Pembangunan Inspektorat;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Inspektorat;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan

7) Informasi lain terkait pelayanan Inspektorat.

b. Analisis gambaran pelayanan Inspektorat;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Inspektorat adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Inspektorat;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Inspektorat.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu berdasarkan renstra Inspektorat;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Inspektorat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Inspektorat;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Inspektorat;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Inspektorat sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat;

Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Inspektorat dengan saran dan masukan dari stakeholder terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);



- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
- 20) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; dan
- 21) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025. Adapun tujuan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta

menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dengan rincian antara lain :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. Parameter pengukuran kinerja sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode 1 (satu) tahun; dan
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Proses perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci. Oleh karena itu, target kinerja yang telah ditetapkan harus diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



Menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Daerah, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pencapaian Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2020-2024.

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024. Evaluasi terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai terakhir pelaksanaan Renstra Inspektorat 2020-2024 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Tabel 2.1.a
Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 6 + 11		13=12/4 x100%		14=11/6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi yang terlayani	1002031 %	33.776.377.563	100,001073 %	15.908.740.328	100,000514 %	9.092.276.919	97,22%	8.907.190.769	98,61%	24.815.931.097	98,61%	73,47%	97,22%	97,96%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlayani	10038 %	85.464.200	100,0020 %	18.714.200	100,009 %	-	100,00%	-	100,00%	18.714.200	100,00%	21,90%	100,00%	0,00%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28Dokumen	12.003.600	14Dokumen	7.003.600	7Dokumen	-	7	-	21	7.003.600	75,00%	58,35%	100,00%	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5Laporan	11.959.700	3Laporan	9.959.700	1Laporan	-	1	-	4	9.959.700	80,00%	83,28%	100,00%	0,00%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5Laporan	61.500.900	3Laporan	1.750.900	1Laporan	-	1	-	4	1.750.900	80,00%	2,85%	100,00%	0,00%
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan yang terlayani	100215 %	21.290.587.342	100,00100 %	9.468.844.967	100,0055 %	5.495.024.459	100,00%	5.462.558.080	100,00%	14.931.403.047	100,00%	70,13%	100,00%	99,41%
7	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190Orang /Bulan	21.071.357.142	85Orang /Bulan	9.354.051.967	50Orang /Bulan	5.446.540.859	50	5.414.074.480	135	14.768.126.447	71,05%	70,09%	100,00%	99,40%
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20Dokumen	205.264.000	12Dokumen	102.826.800	4Dokumen	48.483.600	4	48.483.600	16	151.310.400	80,00%	73,72%	100,00%	100,00%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5Laporan	13.966.200	3Laporan	11.966.200	1Laporan	-	1	-	4	11.966.200	80,00%	85,68%	100,00%	0,00%
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Kepegawaian yang terlayani	10068 %	1.506.657.200	100,0030 %	546.657.200	100,0020 %	460.000.000	100,00%	443.406.478	100,00%	990.063.678	100,00%	65,71%	100,00%	96,39%



RENCANA KERJA TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 6 + 11		13=12/4 x100%		14=11/6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugs dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68Orang	1.506.657.200	30Orang	546.657.200	20Orang	460.000.000	20	443.406.478	50	990.063.678	73,53%	65,71%	100,00%	96,39%
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	1001322 %	3.741.825.400	100,00680 %	1.966.666.100	100,00351 %	1.018.691.700	100,00%	1.002.343.378	100,00%	2.969.009.478	100,00%	79,35%	100,00%	98,40%
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20Paket	33.304.300	12Paket	15.113.300	4Paket	10.005.000	4	10.005.000	16	25.118.300	80,00%	75,42%	100,00%	100,00%
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20Paket	516.888.700	12Paket	241.088.300	4Paket	125.800.000	4	112.212.200	16	353.300.500	80,00%	68,35%	100,00%	89,20%
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	20Paket	54.918.900	12Paket	22.418.900	4Paket	12.500.000	4	12.500.000	16	34.918.900	80,00%	63,58%	100,00%	100,00%
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	20Paket	254.863.200	12Paket	138.129.100	4Paket	58.452.700	4	58.452.700	16	196.581.800	80,00%	77,13%	100,00%	100,00%
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42Dokumen	77.871.400	12Dokumen	40.763.600	15Dokumen	17.108.000	15	16.880.000	27	57.643.600	64,29%	74,02%	100,00%	98,67%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1200Laporan	2.803.978.900	620Laporan	1.509.152.900	320Laporan	794.826.000	320	792.293.478	940	2.301.446.378	78,33%	82,08%	100,00%	99,68%
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani	100164 %	4.430.406.000	100,00132 %	2.757.196.000	100,0031 %	1.373.210.000	100,00%	1.289.980.000	100,00%	4.047.176.000	100,00%	91,35%	100,00%	93,94%
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	164Unit	4.430.406.000	132Unit	2.757.196.000	31Unit	1.373.210.000	31	1.289.980.000	163	4.047.176.000	99,39%	91,35%	100,00%	93,94%
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani	10060 %	485.792.302	100,0036 %	216.498.702	100,0012 %	133.696.800	100,00%	119.558.008	100,00%	336.056.708	100,00%	69,18%	100,00%	89,42%
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20Laporan	33.415.000	12Laporan	17.415.000	4Laporan	6.000.000	4	6.000.000	16	23.415.000	80,00%	70,07%	100,00%	100,00%



RENCANA KERJA TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 6 + 11		13=12/4 x100%		14=11/6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20Lapora n	250.383.702	12Lapora n	106.083.702	4Lapora n	73.200.000	4	59.114.187	16	165.197.889	80,00%	65,98%	100,00%	80,76%
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20Lapora n	201.993.600	12Lapora n	93.000.000	4Lapora n	54.496.800	4	54.443.819	16	147.443.819	80,00%	72,99%	100,00%	99,90%
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani	100164 %	2.235.645.119	100,0075 %	934.163.159	100,0036 %	611.653.960	80,56%	589.344.827	90,28%	1.523.507.986	90,28%	68,15%	80,56%	96,35%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4Unit	446.282.163	2Unit	196.014.543	1Unit	138.807.620	1	131.273.550	3	327.288.093	75,00%	73,34%	100,00%	94,57%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	85Unit	1.201.127.756	38Unit	440.595.416	20Unit	246.690.340	20	238.515.277	58	679.110.693	68,24%	56,54%	100,00%	96,69%
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5Unit	536.528.200	3Unit	274.658.200	1Unit	211.870.000	1	210.796.000	4	485.454.200	80,00%	90,48%	100,00%	99,49%
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	70Unit	51.707.000	32Unit	22.895.000	14Unit	14.286.000	7	8.760.000	39	31.655.000	55,71%	61,22%	50,00%	61,32%
30	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	1001580 %	8.575.407.700	100,001029 %	5.254.277.700	100,00283 %	1.891.130.000	99,65%	1.772.280.000	99,82%	7.026.557.700	99,82%	81,94%	99,65%	93,72%
31	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang terlaksana	100772 %	3.193.104.500	100,00493 %	2.041.974.500	100,00142 %	471.130.000	99,30%	470.380.000	99,65%	2.512.354.500	99,65%	78,68%	99,30%	99,84%



RENCANA KERJA TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 6 + 11		13=12/4 x100%		14=11/6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
32	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	223Laporan	708.232.700	135Laporan	502.952.700	44Laporan	85.280.000	44	84.580.000	179	587.532.700	80,27%	82,96%	100,00%	99,18%
33	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	223Laporan	335.887.700	135Laporan	210.667.700	44Laporan	5.220.000	44	5.220.000	179	215.887.700	80,27%	64,27%	100,00%	100,00%
34	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5Laporan	55.057.500	3Laporan	55.057.500	1Laporan	-	1	-	4	55.057.500	80,00%	100,00%	100,00%	0,00%
35	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5Laporan	58.413.700	3Laporan	58.413.700	1Laporan	-	1	-	4	58.413.700	80,00%	100,00%	100,00%	0,00%
36	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	75Laporan	1.303.423.900	45Laporan	921.223.900	15Laporan	142.200.000	15	142.200.000	60	1.063.423.900	80,00%	81,59%	100,00%	100,00%
37	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang dibentuk	3Kerjasama	26.220.000	2Kerjasama	26.220.000	1Kerjasama	-	0	-	2	26.220.000	66,67%	100,00%	0,00%	0,00%
38	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	238Dokumen	705.869.000	170Dokumen	267.439.000	36Dokumen	238.430.000	36	238.380.000	206	505.819.000	86,55%	71,66%	100,00%	99,98%
39	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlaksana	100808 %	5.382.303.200	100,00536 %	3.212.303.200	100,00141 %	1.420.000.000	100,00%	1.301.900.000	100,00%	4.514.203.200	100,00%	83,87%	100,00%	91,68%
40	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	8Laporan	103.952.500	6Laporan	53.952.500	1Laporan	-	1	-	7	53.952.500	87,50%	51,90%	100,00%	0,00%
41	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	800Laporan	5.278.350.700	530Laporan	3.158.350.700	140Laporan	1.420.000.000	140	1.301.900.000	670	4.460.250.700	83,75%	84,50%	100,00%	91,68%
42	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pemenuhan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	100143 %	1.442.375.300	100,0089 %	512.375.300	100,0035 %	380.000.000	100,00%	379.920.700	100,00%	892.296.000	100,00%	61,86%	100,00%	99,98%



RENCANA KERJA TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 6 + 11		13=12/4 x100%		14=11/6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
43	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebutuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan yang terlaksana	1006 %	132.800.000	100,002 %	32.800.000	100,002 %		100,00%		100,00%	32.800.000	100,00%	24,70%	100,00%	0,00%
44	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	3Reko menda si	66.400.000	1Reko menda si	16.400.000	1Reko menda si		1		2	16.400.000	66,67%	24,70%	100,00%	0,00%
45	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan disusun	3Reko menda si	66.400.000	1Reko menda si	16.400.000	1Reko menda si		1		2	16.400.000	66,67%	24,70%	100,00%	0,00%
46	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kebutuhan Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	100137 %	1.309.575.300	100,0087 %	479.575.300	100,0033 %	380.000.000	100,00%	379.920.700	100,00%	859.496.000	100,00%	65,63%	100,00%	99,98%
47	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44Perang kat Daerah	71.766.900	28Perang kat Daerah	21.766.900	10Perang kat Daerah		10		38	21.766.900	86,36%	30,33%	100,00%	0,00%
48	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44Perang kat Daerah	174.221.000	28Perang kat Daerah	24.221.000	12Perang kat Daerah	50.000.000	12	50.000.000	40	74.221.000	90,91%	42,60%	100,00%	100,00%
49	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5Kegiat an	160.415.000	1Kegiat an	10.415.000	2Kegiat an	50.000.000	2	49.999.700	3	60.414.700	60,00%	37,66%	100,00%	100,00%
50	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44Perang kat Daerah	903.172.400	30Perang kat Daerah	423.172.400	9Perang kat Daerah	280.000.000	9	279.921.000	39	703.093.400	88,64%	77,85%	100,00%	99,97%
JUMLAH KESELURUHAN			100%	43.794.160.563	100%	21.675.393.328	100%	11.363.406.919	98,96%	11.059.391.469	99,48%	32.734.784.797	99,48%	72,42%	98,96%	97,22%



Tabel 2.1.b
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah
s.d Triwulan I Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	2	3	4		5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 6 + 11		13=12/5 x100%		14=11/6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi yang terlayani	100%2041	32.812.582.472	100,00%1579	24.815.931.097	100,00%412	7.811.565.225	30,32%	1.095.360.664	65,16%	25.462.001.725	65,16%	77,60%	30,32%	14,02%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlayani	100%37	18.714.200	100,00%29	18.714.200	100,00%8	-	75,00%	-	87,50%	18.714.200	87,50%	100,00%	75,00%	0,00%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27Dokumen	7.003.600	21Dokumen	7.003.600	6Dokumen	-	4	-	25	7.003.600	92,59%	100,00%	66,67%	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5Laporan	9.959.700	4Laporan	9.959.700	1Laporan	-	1	-	5	9.959.700	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5Laporan	1.750.900	4Laporan	1.750.900	1Laporan	-	1	-	5	1.750.900	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan yang terlayani	100%215	21.155.764.251	100,00%155	14.931.403.047	100,00%60	6.191.894.825	91,67%	986.641.996	95,83%	15.911.954.961	95,83%	75,21%	91,67%	15,93%
7	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190Orang /Bulan	20.938.934.051	135Orang /Bulan	14.768.126.447	55Orang /Bulan	6.138.341.225	55	986.641.996	190	15.748.678.361	100,00%	75,21%	100,00%	16,07%
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20Dokumen	204.864.000	16Dokumen	151.310.400	4Dokumen	53.553.600	0	-	16	151.310.400	80,00%	73,86%	0,00%	0,00%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5Laporan	11.966.200	4Laporan	11.966.200	1Laporan	-	0	-	4	11.966.200	80,00%	100,00%	0,00%	0,00%
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Kepegawaian yang terlayani	100%64	1.455.325.200	100,00%44	990.063.678	100,00%20	448.668.000	0,00%	-	50,00%	981.972.074	50,00%	67,47%	0,00%	0,00%
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugs dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64Orang	1.455.325.200	44Orang	990.063.678	20Orang	448.668.000	0	-	44	981.972.074	68,75%	67,47%	0,00%	0,00%



RENCANA KERJA TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	2	3	4		5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 6 + 11		13=12/5 x100%		14=11/6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	1001296	3.585.632.600	100,00%1029	2.969.009.478	100,00%267	600.274.800	16,10%	63.218.600	58,05%	3.021.619.958	0,58%	84,27%	16,10%	10,53%
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20Paket	31.087.200	16Paket	25.118.300	4Paket	5.968.900	1	1.820.600	17	26.938.900	85,00%	86,66%	25,00%	30,50%
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15Paket	442.583.600	14Paket	353.300.500	1Paket	75.695.300	0	-	14	353.300.500	93,33%	79,83%	0,00%	0,00%
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	20Paket	49.987.900	16Paket	34.918.900	4Paket	15.069.000	1	4.878.000	17	39.236.900	85,00%	78,49%	25,00%	32,37%
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	20Paket	255.273.400	16Paket	196.581.800	4Paket	58.691.600	1	9.538.000	17	206.119.800	85,00%	80,74%	25,00%	16,25%
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41Dokumen	76.231.600	27Dokumen	57.643.600	14Dokumen	18.360.000	0	-	27	57.506.600	65,85%	75,44%	0,00%	0,00%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1180Laporan	2.730.468.900	940Laporan	2.301.446.378	240Laporan	426.490.000	40	46.982.000	980	2.338.517.258	83,05%	85,65%	16,67%	11,02%
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani	100%213	4.130.406.000	100,00%163	4.047.176.000	100,00%0	-	0,00%	-	50,00%	3.648.504.018	50,00%	88,33%	0,00%	0,00%
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	213Unit	4.130.406.000	163 Unit	4.047.176.000	0Unit	-	0	-	163	3.648.504.018	76,53%	88,33%	0,00%	0,00%
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani	100%60	472.892.302	100,00%48	336.056.708	100,00%12	122.696.800	25,00%	20.403.968	62,50%	348.076.100	62,50%	73,61%	25,00%	16,63%
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20Laporan	28.415.000	16 Laporan	23.415.000	4Laporan	5.000.000	1	800.000	17	24.215.000	85,00%	85,22%	25,00%	16,00%
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20Laporan	242.483.702	16 Laporan	165.197.889	4Laporan	63.200.000	1	10.603.968	17	167.417.281	85,00%	69,04%	25,00%	16,78%
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20Laporan	201.993.600	16 Laporan	147.443.819	4Laporan	54.496.800	1	9.000.000	17	156.443.819	85,00%	77,45%	25,00%	16,51%
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%156	1.993.847.919	100,00%111	1.523.507.988	100,00%45	448.030.800	4,44%	25.096.100	52,22%	1.531.160.414	52,22%	76,79%	4,44%	5,60%



RENCANA KERJA TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	2	3	4		5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 6 + 11		13=12/5 x100%		14=11/6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemerintah Daerah yang terlayani														
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4Unit	436.188.963	3 Unit	327.288.093	1Unit	101.366.800	0	6.541.100	3	330.047.598	75,00%	75,67%	0,00%	6,45%
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	86Unit	982.107.756	58 Unit	679.110.693	28Unit	294.822.000	0	17.555.000	58	684.738.616	67,44%	69,72%	0,00%	5,95%
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5Unit	531.028.200	4 Unit	485.454.200	1Unit	44.500.000	0	-	4	483.749.200	80,00%	91,10%	0,00%	0,00%
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	61Unit	44.523.000	46Unit	31.655.000	15Unit	7.342.000	2	1.000.000	48	32.625.000	78,69%	73,28%	13,33%	13,62%
30	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	100%1599	8.640.037.700	100,00%1360	7.026.557.700	100,00%238	1.494.630.000	17,89%	228.805.000	58,95%	7.193.918.700	58,95%	83,26%	17,89%	15,31%
31	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang terlaksana	100%819	2.927.734.500	100,00%682	2.512.354.500	100,00%136	414.630.000	16,18%	44.240.000	58,09%	2.547.320.500	58,09%	87,01%	16,18%	10,67%
32	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	223Laporan	648.192.700	179Laporan	587.532.700	44Laporan	59.960.000	0	-	179	587.532.700	80,27%	90,64%	0,00%	0,00%
33	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	223Laporan	279.432.700	179Laporan	215.887.700	44Laporan	63.545.000	22	44.240.000	201	260.127.700	90,13%	93,09%	50,00%	69,62%
34	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5Laporan	55.057.500	4Laporan	55.057.500	1Laporan	-	0	-	4	55.057.500	80,00%	100,00%	0,00%	0,00%
35	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5Laporan	58.413.700	4Laporan	58.413.700	1Laporan	-	0	-	4	58.413.700	80,00%	100,00%	0,00%	0,00%
36	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	75Laporan	1.204.548.900	60Laporan	1.063.423.900	15Laporan	141.125.000	0	-	60	1.063.423.900	80,00%	88,28%	0,00%	0,00%
37	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang dibentuk	3Kerjasama	26.220.000	1Kerjasama	26.220.000	1Kerjasama	-	0	-	1	26.220.000	33,33%	100,00%	0,00%	0,00%



RENCANA KERJA TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	2	3	4		5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 6 + 11		13=12/5 x100%		14=11/6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
38	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	285Dokumen	655.869.000	255Dokumen	505.819.000	30Dokumen	150.000.000	0	-	255	496.545.000	89,47%	75,71%	0,00%	0,00%
39	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlaksana	100%780	5.712.303.200	100,00%678	4.514.203.200	100,00%102	1.080.000.000	19,61%	184.565.000	59,80%	4.646.598.200	59,80%	81,34%	19,61%	17,09%
40	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10Laporan	53.952.500	8Laporan	53.952.500	2Laporan	-	0	-	8	53.952.500	80,00%	100,00%	0,00%	0,00%
41	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	770Laporan	5.658.350.700	670Laporan	4.460.250.700	100Laporan	1.080.000.000	20	184.565.000	690	4.592.645.700	89,61%	81,17%	20,00%	17,09%
42	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pemenuhan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	100%145	1.148.349.300	100,00%126	892.296.000	100,00%19	255.974.000	0,00%	-	50,00%	891.145.000	50,00%	77,60%	0,00%	0,00%
43	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebutuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang terlaksana	100%8	32.800.000	100,00%6	32.800.000	100,00%2	-	0,00%	-	50,00%	32.113.000	50,00%	97,91%	0,00%	0,00%
44	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4Rekomendasi	16.400.000	3Rekomendasi	16.400.000	1Rekomendasi	-	0	-	3	15.761.000	75,00%	96,10%	0,00%	0,00%
45	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan disusun	4Rekomendasi	16.400.000	3Rekomendasi	16.400.000	1Rekomendasi	-	0	-	3	16.352.000	75,00%	99,71%	0,00%	0,00%
46	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kebutuhan Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	100%137	1.115.549.300	100,00%120	859.496.000	100,00%17	255.974.000	0,00%	-	50,00%	859.032.000	50,00%	77,01%	0,00%	0,00%
47	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44Perangkat Daerah	27.740.900	38Perangkat Daerah	21.766.900	6Perangkat Daerah	5.974.000	0	-	38	21.766.900	86,36%	78,47%	0,00%	0,00%



RENCANA KERJA TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Triwulan I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	2	3	4		5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 6 + 11		13=12/5 x100%		14=11/6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
48	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44Perang kat Daerah	174.221.000	40Perang kat Daerah	74.221.000	4Peran gkat Daera h	100.000.000	0	-	40	74.110.000	90,91%	42,54%	0,00%	0,00%
49	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5Kegiat an	110.415.000	3Kegiat an	60.414.700	2Kegiat an	50.000.000	0	-	3	60.325.700	60,00%	54,64%	0,00%	0,00%
50	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44Perang kat Daerah	803.172.400	39Perang kat Daerah	703.093.400	5Peran gkat Daera h	100.000.000	0	-	39	702.829.400	88,64%	87,51%	0,00%	0,00%
JUMLAH KESELURUHAN			100%	42.600.969.472	100%	32.734.784.797	100%	9.562.169.225	16,07%	1.324.165.664	58,03%	33.547.065.425	58,03%	79,49%	16,07%	9,78%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 pada Tabel 2.1.a, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tidak terdapat kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Tabel 2.1.c

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
2	3
Tidak Ada	

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.d

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhi anggaran program
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, kinerja pejabat/ panitia pengadaan barang dan jasa yang baik.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2	3
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, kinerja pejabat/ panitia pengadaan barang dan jasa yang baik.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terpenuhi anggaran program
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Adanya komitmen seluruh APIP dalam melakukan pengawasan perangkat daerah, pengawasan desa, reviu serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
Reviu Laporan Kinerja	
Reviu Laporan Keuangan	
Pengawasan Desa	
Kerjasama Pengawasan Internal	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Adanya komitmen seluruh APIP dalam pengawasan dengan tujuan tertentu dalam penyelesaian kerugian negara/daerah
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terpenuhi anggaran program
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Adanya komitmen seluruh APIP menyelesaikan dokumen PKP2T Berbasis Risiko dan Evaluasi SPIP terintegrasi.
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	- Adanya komitmen pimpinan, Kerjasama dengan Perangkat Daerah dan Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam kegiatan audit dan pendampingan - Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Utara dengan Aparat Penegak Hukum (APH) - Kinerja Tim PMPRB Kabupaten Tapanuli Utara yang baik
Pendampingan dan Asistensi	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1.c dan Tabel 2.1.d, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan BPK-RI

- Perwakilan Sumatera Utara dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti;
2. Pemantauan berkelanjutan terhadap SPIP;
 3. Peningkatan anggaran dalam rangka pengawasan minimal 0,75 % dari APBD;
 4. Penyempurnaan Pedoman sistem kebijakan dan prosedur Pengawasan;
 5. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan; dan
 6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai Inspektorat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tidak mengalami perubahan nama dalam Perangkat Daerah.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2023 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah, secara rinci, capaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proye ksi	Persentase Realisasi Terhadap Target					Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							15
1	Nilai Kapabilitas APIP	-	-	2,24	2,24	3,00	3,10	3,20	2,24	2,24	2,26	3,00	3,20		100,00%	100,00%	75,33%	96,77%	100,00%	
2	Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindak lanjuti			76,00%	87,70%	93,03%	94,20%	95,46%	76,00%	91,42%	92,96%	91,57%	95,46%		100,00%	104,24%	99,92%	97,21%	100,00%	
3	Persentase Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan Nilai B			50,00%	65,00%	72,00%	85,00%	92,00%	50,00%	68,18%	70,45%	75,00%	92,00%		100,00%	104,89%	97,85%	88,24%	100,00%	
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah yang dievaluasi			62,00	68,00	70,00	72,00	75,00	62,00	70,01	71,88	73,02	75,00		100,00%	102,96%	102,69%	101,42%	100,00%	
	Rata-Rata														100,00%	103,02%	93,95%	95,91%	100,00%	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.2, bahwa rata-rata capaian keseluruhan IKU yaitu 95,91%. Dari Tabel 2.2. diatas dapat disimpulkan ada 3 (tiga) IKU Inspektorat tidak mencapai target dan 1 (satu) IKU Inspektorat telah mencapai target. Capaian kinerja keseluruhan menunjukkan hasil yang belum baik sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang dikeluarkan BPKP Tahun 2023 pada Penilaian Mandiri (Self Assesment) atas input data dalam aplikasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP BPKP terhadap capaian elemen-elemen sebagaimana dijelaskan tabel berikut :

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Current Desk Evaluasi	
		Skor Level	Skor Level	Skor Level	Skor Level
1	Pengelolaan SDM	0,63	3	0,54	3
2	Praktik Profesional	0,54	3	0,54	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,18	3	0,18	3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3	0,18	3
5	Struktur Tata Kelola	0,44	3	0,36	3
6	Peran dan Layanan	1,20	3	1,20	3
	Simpulan Entitas	3,17	3	3,00	3

Dari hasil Penilaian Mandiri (Self Assesment) BPKP pada tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara hanya memperoleh Nilai Kapabilitas APIP 3,00 dari target 3,10.

2. Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang ditindaklanjuti, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pelaksana fungsi pengawasan harus memastikan kepatuhan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)-RI pada perangkat daerah (PD) atas temuan-temuan sebagaimana dimaksud. Pada penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI pada tahun 2023 mencapai 91,57% dari target 94,20.
3. Persentase hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai B, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan evaluasi pada perangkat daerah Tahun 2023 menunjukkan nilai rata-rata hasil evaluasi kinerja pada 44 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nilai B sebanyak 33 Perangkat Daerah sehingga terdapat persentase 75,00% dari target 85,00%.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat yang dievaluasi Tahun 2023 menunjukkan nilai 73,02 dari target Nilai 72,00.

2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

Tabel 2.3.a
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

KEKUATAN	KELEMAHAN
Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing- masing fungsi	Beban kerja yang belum sesuai dengan jumlah SDM
Adanya forum komunikasi/ koordinasi pengawasan	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Motivasi bekerja yang tinggi	

Selain itu, selama Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Tabel 2.3.b
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

PELUANG	TANTANGAN
Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kegiatan pendampingan	Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut belum optimal
Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Tuntutan penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai consulting partner bagi PD di Kabupaten Tapanuli Utara
Perkembangan teknologi/ sistem informasi	Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan yang harus disikapi secara cepat dan tepat
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ASN	Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif dan cepat Amanat pelaksanaan kegiatan Early Warning System (EWS), Benturan Kepentingan, dan Consulting Center

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring evaluasi;
2. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
4. Mengoptimalkan manajemen tindak lanjut hasil pengawasan; dan
5. Mengoptimalkan sistem deteksi dini (early warning) dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01	Inspektorat Daerah	Kab. Taput			12.095.921.848					16.000.000.000	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Taput	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi yang terlayani	100 %	9.739.001.848	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Taput	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi yang terlayani	100%	11.175.000.000	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan	11 Dokumen	33.250.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan	11 Dokumen	33.250.000	
5.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.000.000	
5.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	
5.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25.250.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25.250.000	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen 77	6.325.939.048	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77 Dokumen	6.326.119.700	
5.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Kab. Taput	Jumlah Orang Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang /Bulan	6.232.371.448	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Kab. Taput	Jumlah Orang Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang /Bulan	6.232.552.100	
5.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	87.567.600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	87.567.600	
5.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	
5.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	4.000.000	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan 6	16.645.500	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Laporan	16.645.500	



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	16.645.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	16.645.500	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Orang yang mengikuti Diklat/ Sosialisasi	Orang 412	700.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Taput	Persentase Kebutuhan Administrasi Kepegawaian yang terlayani	412 %	1.600.000.000	
6.01.01.2.02.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Taput	Jumlah Pegawai berdasarkan tugs dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	600.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Taput	Jumlah Pegawai berdasarkan tugs dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	1.500.000.000	
6.01.01.2.02.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Taput	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	400 Orang	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Taput	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	400 Orang	100.000.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan 288	773.672.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Taput	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	288 Laporan	1..244.000.000	
6.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Taput	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	10.038.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Taput	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	15.000.000	
6.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	
6.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	
6.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Taput	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	78.940.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Taput	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	84.000.000	
6.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15 Dokumen	20.618.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15 Dokumen	25.000.000	
6.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Taput	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laproan	44.075.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Taput	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laproan	50.000.000	
6.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	800.000.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Unit Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34 Unit	612.001.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Unit Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34 Unit	1.000.000.000	
6.01.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Taput	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	313.246.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Taput	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	400.000.000	
6.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Kab. Taput	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	96.623.000	Pengadaan Mebel	Kab. Taput	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Taput	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	202.132.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Taput	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	500.000.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	129.984.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	129.984.800	
6.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10.000.000	
6.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	70.380.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	75.000.000	
6.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	54.604.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	55.000.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Unit Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54 Unit	1.147.508.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Unit Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54 Unit	825.000.000	
6.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Taput	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	94.245.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Taput	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	120.000.000	
6.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Taput	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 Unit	252.672.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Taput	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 Unit	480.000.000	
6.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Taput	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	781.481.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Taput	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
6.01.01.2.09.011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Taput	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	24 Unit	19.110.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Taput	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	24 Unit	25.000.000	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Taput	Cakupan Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	100 %	1.786.920.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Taput	Cakupan Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	100 %	3.500.000.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	200 Laporan	686.920.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	200 Laporan	1.850.000.000	
6.01.02.2.01.001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	44 Laporan	100.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	44 Laporan	500.000.000	



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.02.2.01.002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	44 Laporan	150.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	44 Laporan	500.000.000	
6.01.02.2.01.003	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	19.240.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	50.000.000	
6.01.02.2.01.004	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	17.680.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	100.000.000	
6.01.02.2.01.005	Pengawasan Desa	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15 Laporan	250.000.000	Pengawasan Desa	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15 Laporan	350.000.000	
6.01.02.2.01.006	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Taput	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang dibentuk	1 Kesepakatan	30.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Taput	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang dibentuk	1 Kesepakatan	50.000.000	
6.01.02.2.01.007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	95 Dokumen	120.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	95 Dokumen	300.000.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Taput	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlaksana	100 %	1.100.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Taput	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlaksana	100 %	1.650.000.000	
6.01.02.2.02.001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	50.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	150.000.000	
6.01.02.2.02.002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	130 Laporan	1.050.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	130 Laporan	1.500.000.000	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Taput	Cakupan Kebutuhan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 %	570.000.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Taput	Cakupan Kebutuhan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 %	1.325.000.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Kab. Taput	Persentase Kebutuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan yang terlaksana	% 2	100.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Kab. Taput	Persentase Kebutuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan yang terlaksana	2 %	225.000.000	
6.01.03.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Taput	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	50.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Taput	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	75.000.000	
6.01.03.2.01.002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Taput	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	50.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Taput	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	150.000.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Taput	Persentase Kebutuhan Pendampingan dan Asistensi	% 20	470.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Taput	Persentase Kebutuhan Pendampingan dan Asistensi yang	20 %	1.100.000.000	



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang terlaksana					terlaksana			
6.01.03.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Taput	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	7 Perangkat Daerah	150.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Taput	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	7 Perangkat Daerah	200.000.000	
6.01.03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Taput	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 Perangkat Daerah	100.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Taput	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 Perangkat Daerah	400.000.000	
6.01.03.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Taput	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Taput	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	300.000.000	
6.01.03.2.02.004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Taput	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah	120.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Taput	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah	200.000.000	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah, penelitian lapangan dan pengamatan serta masukan dari masyarakat maka dapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan dapat disusun dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Taput	Jumlah SDM APIP Bersertifikat Yang Bertambah	3 Orang	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan	11 Dokumen	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36 Dokumen	
1.2.1	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Kab. Taput	Jumlah Orang Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang /Bulan	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
1.3.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Laporan	
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Orang yang mengikuti Diklat/ Sosialisasi	412 Orang	
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Taput	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Taput	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	400 Orang	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	408 Laporan	



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Taput	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Taput	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15 Dokumen	
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Taput	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laproan	
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Unit Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34 Unit	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Taput	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	
1.6.2	Pengadaan Mebel	Kab. Taput	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Taput	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Unit Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54 Unit	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Taput	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Taput	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 Unit	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Taput	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	
1.8.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Taput	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	24 Unit	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Taput	Jumlah Rekomendasi Temuan yang menindaklanjuti berdasarkan Wilayah Pemeriksaan	4.0 Reko 00 mendasi	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan	200 Laporan	



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Internal		
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	44 Laporan	
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	44 Laporan	
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	
2.1.5	Pengawasan Desa	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15 Laporan	
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Taput	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang dibentuk	1 Kesepakatan	
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Taput	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	95 Dokumen	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	122 Laporan	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Taput	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 Laporan	
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	120 Laporan	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Taput	Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Evaluasi oleh APIP	31 Perangkat Daerah	
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	2 Laporan	
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Taput	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Taput	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan disusun	1 Rekomendasi	
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Taput	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	20 Laporan	
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Taput	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	7 Perangkat Daerah	
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Taput	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 Perangkat Daerah	
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Taput	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Taput	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

a. Kegiatan pengawasan, yaitu :

1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi :

Reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA-SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, reviu realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK-Fisik, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBK, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

2) Pengawasan prioritas nasional meliputi :

Monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;

3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi :

Penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota dan evaluasi pelayanan publik; dan

4) Penegakan integritas, meliputi :

Penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan renGlna aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System.

b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti :

Pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti :

Laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

d. Kegiatan reviu :

DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima persen) alokasi dana penunjang DAK Fisik, Mandatory Spending Anggaran Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah melaksanakan survei penilaian integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Berdasarkan misi ke - 8 RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara, "Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem egovernment" dengan tujuan "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih", maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan jangka menengah : "Meningkatkan Implementasi SPIP" dengan sasaran ke-1 (satu) yaitu : 1) Pelaksanaan Pengendalian Internal sesuai Standar; dengan Indikator Kinerja : 1) Nilai Kapabilitas APIP; 2) Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti, sedangkan Sasaran ke-2 (dua) yaitu : Nilai AKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi dengan Indikator Kinerja : 1) Persentase hasil Evaluasi Sakip Perangkat Daerah dengan Nilai B; 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah yang dievaluasi.

Dengan memperhatikan misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut diatas, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara serta tujuan dan sasaran

Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, maka rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran	
			2025	2026
1	2	3	4	
Meningkatnya Implementasi SPIP	-	Nilai Maturitas SPIP	3,10	3,12
	Pelaksanaan Pengendalian Internal sesuai Standar	Nilai Kapabilitas APIP	3,04	3,06
		Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	90,00%	90,20%
	Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persentase hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai B	77,00%	79,00%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah yang dievaluasi	75,00	77,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Perangkat Daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :



Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Kebutuhan Dana	
								Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	4	6	8	10	11	12	14	15
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				12.095.921.848				16.000.000.000
6.01	Inspektorat Daerah				12.095.921.848				16.000.000.000
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM APIP Bersertifikat Yang Bertambah		3 Orang	9.739.001.848		-	3Orang	11.070.000.000
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		11 Dokumen	33.250.000		-	8Dokumen	60.000.000
6.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Taput	6 Dokumen	6.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	6Dokumen	12.000.000
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Taput	1 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	1Laporan	8.000.000
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Taput	4 Laporan	25.250.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	1Laporan	40.000.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangat Daerah		54 Laporan	6.325.939.048			54Laporan	6.310.000.000
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Taput	60 Orang/ Bulan	6.232.371.448	Dana Transfer Umum – DAU	-	65Orang/ Bulan	6.250.000.000
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Taput	4 Laporan	87.567.600	Pendapatan Asli Daerah - (PAD)	-	4Laporan	50.000.000
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Taput	1 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	1Laporan	5.000.000
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Taput	1 Laporan	4.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	1Laporan	5.000.000
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Taput	6 Laporan	16.645.500			6Laporan	20.000.000
6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Taput	6 Laporan	16.645.500	Dana Transfer Umum – DAU		6Laporan	20.000.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Diklat/ Sosialisasi		412 Orang	700.000.000			414Orang	1.600.000.000



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Kebutuhan Dana	
								Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	4	6	8	10	11	12	14	15
6.01.01.2.02.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugs dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Taput	12 Orang	600.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	14Orang	1.500.000.000
6.01.01.2.02.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Taput	400 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum – DAU		400Orang	100.000.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Taput	288 Laporan	773.672.200			408Laporan	1.245.000.000
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Taput	4 Paket	10.038.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	4Paket	20.000.000
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Taput	1 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	1Paket	225.000.000
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Taput	4 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	4Paket	40.000.000
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Taput	4 Paket	78.940.800	Dana Transfer Umum – DAU	-	4Paket	90.000.000
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Taput	15 Dokumen	20.618.400	Dana Transfer Umum – DAU	-	15Dokumen	20.000.000
6.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Taput	20 Dokumen	44.075.000	Dana Transfer Umum – DAU		20Dokumen	50.000.000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Taput	240 Laporan	500.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	360Laporan	800.000.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	34 Unit	612.001.500			30Unit	370.000.000
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Taput	4 Unit	313.246.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	0Unit	0
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Taput	10 Unit	96.623.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	10Unit	120.000.000
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Taput	20 Unit	202.132.500	Dana Transfer Umum – DAU	-	20Unit	250.000.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	12 Laporan	129.984.800			12Laporan	140.000.000
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Taput	4 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	4Laporan	10.000.000
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Taput	4 Laporan	70.380.000	Pendapatan Asli Daerah - (PAD)	-	4Laporan	75.000.000
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Taput	4 Laporan	54.604.800	Dana Transfer Umum – DAU	-	4Laporan	55.000.000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	54 Unit	1.147.508.800			54Unit	1.325.000.000



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana	
								Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	4	6	8	10	11	12	14	15
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas (Tahu,Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Taput	1 Unit	94.245.400	Dana Transfer Umum – DAU	-	1Unit	200.000.000
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Taput	28 Unit	252.672.400	Dana Transfer Umum – DAU	-	28Unit	600.000.000
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Taput	1 Unit	781.481.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	1Unit	500.000.000
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Kab. Taput	24 Unit	19.110.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	24Unit	25.000.000
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Temuan yang menindaklanjuti berdasarkan Wilayah Pemeriksaan	Kab. Taput	4000 Reko mendasi	1.786.920.000			4100Reko mendasi	3.400.000.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Taput	201 Laporan	686.920.000			201Laporan	1.600.000.000
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Taput	44 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	44Laporan	350.000.000
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Taput	44 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	44Laporan	400.000.000
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Taput	1 Laporan	19.240.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	1Laporan	50.000.000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Taput	1 Laporan	17.680.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	1Laporan	100.000.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Taput	15 Laporan	250.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	15Laporan	350.000.000
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang dibentuk	Kab. Taput	1 Kesepa katan	30.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	1Kesepa katan	50.000.000
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Taput	95 Laporan	120.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	95Laporan	300.000.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Taput	132 Laporan	1.100.000.000			132Laporan	1.300.000.000
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Taput	2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	2Laporan	100.000.000
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Taput	130 Laporan	1.050.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	130Laporan	1.200.000.000
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang	Kab.	31 Perangkat	570.000.000			33Perangkat	1.530.000.000



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana	
								Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	4	6	8	10	11	12	14	15
	dan Asistensi	menindaklanjuti Evaluasi oleh APIP	Taput	Daerah				Daerah	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Taput	2 Laporan	100.000.000			4Laporan	200.000.000
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Kab. Taput	1 Reko mendasi	50.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	1Reko mendasi	50.000.000
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan disusun	Kab. Taput	1 Reko mendasi	50.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	3Reko mendasi	150.000.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi		20 Laporan	470.000.000			20Laporan	1.330.000.000
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Taput	7 Perangkat Daerah	150.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	7Perangkat Daerah	250.000.000
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Taput	5 Perangkat Daerah	100.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	5Perangkat Daerah	480.000.000
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Taput	2 Kegiatan	100.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	2Kegiatan	300.000.000
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Taput	6 Perangkat Daerah	120.000.000	Dana Transfer Umum – DAU	-	6Perangkat Daerah	300.000.000



BAB V PENUTUP

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara dan berpedoman pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan mantaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya.

Tarutung,

09-09-2024

Inspektur Daerah,



Drs. Erikson Siagian, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690422 198903 1 003